

Modernitas Bidang Pendidikan di Bali pada Masa Kolonial Belanda*

Sri Lestari
Prodi Ilmu Sejarah Universitas Udayana
sri.lestari@unud.ac.id

Abstrak

Modernitas yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda di Bali sudah dapat dilihat sejak pertengahan abad XIX. Modernitas yang terjadi di Bali sejak masa kolonial Belanda tersebut akan dilihat dalam bidang pendidikan. Metode sejarah membantu dalam mencari dan menemukan sumber terkait sekolah, siswa, dan sistem pendidikan awal di Bali. Usaha memperoleh murid seiring dengan dibukanya sebuah sekolah di Singaraja dengan nama *Erste Inlandsche Scholl*, lalu *Hollands Inlandsche Scholl* (HIS). Berdiri pula sekolah Taman Siswa di Denpasar. Ada pula Sekolah Wanita di Singaraja, kursus ketrampilan, dan sekolah Setia Hati di Negara (Jembrana), BHS Sisiapura di Singaraja dan Seririt, *Hollandsche Balische School* di Bajra (Tabanan). Para siswa Bali tidak hanya bersekolah di Bali tetapi juga ke Jawa yaitu di sekolah MULO, AMS, Ambacht Scholl, dan NIAS. Hal tersebut karena jumlah sekolah di Bali belum mencukupi kebutuhan para calon siswa. Sejak itu pula beberapa orang Bali mulai mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bermaksud memajukan masyarakat Bali baik di bidang agama maupun pendidikan. Perkumpulan tersebut antara lain Setiti Bali, Shanti, dan Putri Bali Sadar. Dalam bidang pendidikan Belanda melaksanakan proyek *Baliseering*. Proyek tersebut diimplementasikan di sekolah-sekolah di Gianyar, Peliatan, dan Mengwi. *Baliseering* adalah salah satu upaya untuk mencegah orang-orang muda diekspose terkena pengaruh-pengaruh yang tak diharapkan, terutama nasionalisasi.

Kata Kunci: *modernitas, sekolah, perkumpulan, murid*

1. Pendahuluan

Pada dekade pertama abad ke-20 seluruh Bali sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, yang ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Klungkung tahun 1908. Sejak itu seluruh Bali memasuki masa kolonial. Salah satu ciri masa kolonial Belanda adalah adanya modernitas, modernisasi, modernisme. Istilah modernitas diartikan sebagai kondisi sosial budaya masyarakat modern. Modernitas sekaligus juga menjadi titik awal baru lantaran ia menawarkan hal-hal baru. Modernisasi menurut Featherstone adalah pandangan dan sikap hidup yang dianut untuk menghadapi masa kini. Modernisme merupakan istilah kebudayaan yang menghendaki sesuatu yang baru, yang berbeda, seperti halnya kata modern (Medhy Aginta Hidayat, 2012:22).

* Diseminasikan pada Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, 13 September 2024 di Denpasar.

Modernitas yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda di Bali sudah dapat dilihat sejak pertengahan abad XIX. Ketika itu Kerajaan Buleleng dapat ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah melalui dua kali pertempuran besar. Menurut Anak Agung Gde Putra Agung (2001: 180-181), setelah Buleleng berada di bawah kekuasaan keluarga raja-raja Karangasem, Belanda mulai menginjakkan kakinya di pulau Bali. Dengan tipu muslihatnya, mereka berhasil memperlemah kekuasaan raja-raja di Bali. Pada mulanya mereka memakai jalan melalui surat-surat perjanjian, setelah itu dengan cara kekerasan, sehingga selama dua puluh dua tahun (1846-1868), Buleleng menjadi gelanggang peperangan yang terkenal dengan nama perang Buleleng, perang Jagaraga dan perang Banjar. Modernitas yang terjadi di Bali sejak masa kolonial Belanda tersebut akan dilihat dalam bidang pendidikan.

2. Metode

Penelitian diawali dengan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan tentang sekolah-sekolah serta kebijakan pendidikan di Bali masa kolonial. Setelah melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut, ditemukan antara lain dokumen *Memorie van Overgave van den aftrendend Resident van Bali en Lombok* yang ditulis oleh H.J.E. Moll, majalah *Djatajoe* tahun 1938, majalah *Damai* tahun 1954, dan Monografi Bali tahun 1955. Tahap selanjutnya memahami dan menafsirkan makna dari informasi yang ada dalam sumber sejarah. Dalam penelitian tentang pendidikan di Bali pada masa kolonial, interpretasi melibatkan analisis terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dan dampaknya pada masyarakat lokal. Tahap terakhir adalah menyusun hasil interpretasi menjadi historiografi modernitas pendidikan di Bali masa kolonial.

3. Hasil dan Pembahasan

Sampai kira-kira tahun 1915, Anak Agung Gde Putra Agung (2001:86) mengatakan usaha untuk mendapatkan murid di Bali Utara untuk mau masuk sekolah desa itu sangat sukar sekali, bahkan sangat mustahil dilakukan dengan cara paksa. Hal itu terkait dengan dibukanya sebuah sekolah di Singaraja dengan nama *Erste Inlandsche Scholl*. Disusul kemudian dengan *Hollands Inlandsche Scholl* (HIS) yang murid-muridnya kebanyakan dari kalangan anak-anak bangsawan dan golongan kaya, sedangkan jumlah yang dapat diterima sangat terbatas (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

HIS bukan merupakan sekolah pertama yang didirikan oleh Belanda, sebab pada tahun 1875, di Singaraja sudah berdiri *Tweede Klasse Scholl* (Anak Agung Gde Putra Agung,

2001:86). Akan tetapi sampai tahun 1924 keadaan sekolah-sekolah di Bali paling tinggi adalah HIS. Jumlah sekolah pada waktu itu adalah 2 buah HIS dan 24 buah sekolah setingkat dengan sekolah dasar. Oleh karena kurangnya sekolah di Bali maka banyak di kalangan murid-murid pada waktu itu melanjutkan pelajarannya ke Jawa antara lain ke Probolinggo, Surabaya, Malang, Yogyakarta, bahkan ada yang sampai ke Batavia (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Pada tahun 1927, pelajar Bali yang bersekolah di Jawa terdapat di sekolah MULO (*Meer Iutgebroid Lager Onderways*) 35 orang, di AMS (*Algemeene Middlebare School*) 1 orang, di *Kweek School* 9 orang, di *Ambacht Scholl* 1 orang, di NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen Scholl*) 1 orang. Selain sekolah yang didirikan Belanda, maka akibat dari perkembangan pergerakan kebangsaan di Bali berdirilah Sekolah Taman Siswa. Sekolah ini didirikan oleh *Komite Taman Siswa* yang didirikan di Denpasar pada tahun 1933, dengan tujuan mengembangkan pendidikan yang menuju cita-cita kemerdekaan dan kesadaran bangsa Indonesia (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Pada waktu mulai masuknya pendidikan Barat yaitu sesudah Bali dapat ditaklukkan oleh Belanda pada permulaan abad ke 19 barulah sistem pendidikan di Bali mengalami perubahan dengan diperkenalkannya sekolah. Akan tetapi karena terasa kurangnya sekolah-sekolah di Bali pada tahun 1920-an putra-putra Bali pun banyak yang bersekolah di Jawa. Sejak itu pula beberapa orang Bali mulai mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bermaksud memajukan masyarakat Bali baik di bidang agama maupun pendidikan (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Sejak tahun 1917 di Singaraja berdiri sebuah perkumpulan yang bernama Setiti Bali. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan, agama dan adat istiadat, serta dalam bidang perekonomian. Perkumpulan ini hanya bertahan sampai tahun 1920 karena ada desakan dari pemerintah dan timbul perselisihan paham di antara anggotanya. Selanjutnya, pada tahun 1921 di Singaraja juga muncul suatu perkumpulan dengan nama Suita Gama Tirta yang dipimpin oleh I Gusti Putu Djelantik. Para anggotanya dari kalangan *Catur Warna* dan bertujuan untuk memuliakan agama dan mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak zaman (Anak Agung Gde Putra Agung, 2001: 89-90). Mereka menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab lontar yang berisi ajaran-ajaran agama, kesusastraan, etika dan filsafat (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Suatu hal yang penting artinya dalam dunia pendidikan yang telah dirintis oleh

perkumpulan itu adalah menghilangkan paham *ajewera* yang merupakan suatu paham atau kepercayaan orang Bali yang melarang setiap orang untuk mengetahui atau membaca isi lontar di Bali, kecuali orang yang sudah dianggap suci. Suci yang dimaksud, sudah dibuatkan upacara *mewinten* terutama bagi golongan Brahmana dan Ksatria. Oleh beberapa orang yang telah berpendidikan barat, seperti I Gusti Putu Djelantik yang pada waktu itu telah menjadi anggota Raad Kerta di Singaraja mulai merintis ke arah kemajuan dengan berdikit-dikit menghapuskan paham *ajewera* tersebut. Rintisan ini diwujudkan dalam bentuk kursus-kursus dan mengadakan pembacaan lontar-lontar dikalangan pemuda yang haus terhadap pengetahuan. Akan tetapi perkumpulan itu tidak panjang umurnya, sehingga dari golongan yang haus akan pengetahuan mendirikan lagi perkumpulan dengan nama Shanti, yang anggotanya kebanyakan dari *Sekeha Jongkok* (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Perkumpulan Shanti bergerak dalam bidang pendidikan dengan mengadakan kursus-kursus agama. Dengan segala usahanya pada tahun 1923 perkumpulan ini berhasil mendirikan Sekolah Perempuan Shanti dengan mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi para wanita agar dapat membaca dan menulis. Di samping itu perkumpulan Shanti juga dapat mengeluarkan *kala warta* dengan nama Shanti Adnyana (Anak Agung Gde Putra Agung, 2001:90).

Suatu perkumpulan lain yang juga berdiri pada periode itu adalah Satya Samudaya Bau Danda Bali dan Lombok (SSBBL), yaitu suatu pergerakan dalam bidang studi fonds. Perkumpulan ini lahir di Karangasem pada tanggal 1 Januari 1925. Tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan ini adalah menyimpan uang, menjalankan atau mengusahakan uang, membikin fonds (tabungan persediaan). Sementara itu, di Denpasar berdiri perkumpulan Studi Club Ganesia. Kelahiran perkumpulan ini dipengaruhi oleh semangat pergerakan nasional para pemuda Bali yang telah mendapatkan pelajaran di Jawa. Mereka ingin meniru perkembangan pendidikan dengan kelompok belajar yang dilihatnya di Jawa. Perkumpulan ini berdiri di Denpasar dengan anggotanya sebanyak 6 orang yaitu: Anak Agung Gde Pemecutan, Nyoman Pegeg, Ketut Tjetog, Ngatman, Sudiman dan Popila. Karena keadaan pada waktu itu sangat keras terhadap organisasi yang mengarah kepada pergerakan nasional, akhirnya perkumpulan ini dibubarkan (I Gusti Gde Raka, 1955:28).

Dalam hubungannya dengan kemajuan pendidikan di Bali, berdiri pula perkumpulan

Putri Bali Sadar pada tanggal 1 Oktober 1936 di Denpasar. Gagasan ini timbul karena banyaknya pelajar putri Bali yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah, karena tidak ada yang menanggung akibat kematian orang tuanya. Ada lima tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan ini, yakni (i) Mengusahakan kerukunan diantara putri-putri Bali dengan memberi dasar peradaban Bali yang sesuai dengan perkembangan jaman; (ii) tolong menolong di antara anggotanya dalam suka dan duka; (iii) memajukan pengetahuan dengan jalan membuka kursus pada waktu sore hari atau pagi; (iv) membuat studi fonds (beasiswa) untuk membantu anak-anak murid perempuan yang putus biaya sekolah; dan (v) memberikan kesempatan kepada putri-putri Bali yang lewat umur untuk menambah pengetahuan membaca dan menulis (I Gusti Gde Raka, 1955).

Berdiri pula Perkoempolan Goeroe-Goeroe Denpasar. Pendirian perkumpulan ini bermula dari ketergugahan para guru di Denpasar untuk ikut menjadi bagian dalam pertumbuhan organisasi pergerakan karena pengaruh dari berbagai organisasi yang timbul di Bali baik dalam bidang sosial maupun politik. Oleh karena itu dilakukan pertemuan untuk membahas hal itu di rumah I Ketoet Loentja yang terletak di Banjar Gemeh. I Ketoet Loentja adalah penggagas pertemuan tersebut. Pertemuan itu dihadiri oleh I Goesti Ajoe Rapeg, Tjokorda Ngoerah Pemajun dan beberapa guru lainnya. Percakapan mereka membahas tentang perkembangan pendidikan di tanah air dan Bali pada khususnya (Cokorde Gede Rai, 1982: 18-19).

Percakapan tersebut di atas menghasilkan niat mereka untuk membentuk suatu organisasi guru-guru Denpasar yang dinamakan Perkoempoelan Goeroe-goeroe Denpasar. Perkoempoelan Goeroe-goeroe Denpasar secara resmi berdiri pada tanggal 23 September 1934. Susunan pengurusnya terdiri dari seorang ketua yaitu I Ketoet Loentja, sekretaris merangkap bendahara I Nengah Mandia, dan pembantu-pembantu Tjokorde Ngoerah Pemajoen, I Nyoman Merta, I Goesti Ajoe Rapeg dan I Goesti Poetoe Merta. Azas dari Perkoempoelan Goeroe-goeroe Denpasar yaitu kekeluargaan artinya dalam melakukan hubungan antara sesama anggota maupun dengan anak didiknya dan masyarakat, dilakukan pendekatan kekeluargaan. Tujuan dari organisasi itu terdiri dari bidang politik, sosial, dan kebudayaan. Dalam bidang politik bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Bidang sosial berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bali. Dalam bidang kebudayaan tetap mempertahankan kebudayaan daerah yang disesuaikan dengan keadaan zaman

(Cokorde Gede Rai, 1982: 19-20).

Perkoempoelan Goeroe-goeroe Denpasar bekerja sama dengan organisasi Bali Dharma Laksana dan Poetri Bali Sadar untuk lebih memperluas bidang pendidikan di kalangan masyarakat Bali terutama yang menyangkut pendidikan di luar bangku sekolah. Mereka membentuk sebuah badan yang disebut dengan *Federatie Commissie* ABC di Denpasar. Setiap organisasi tersebut diwakili oleh tiga orang wakil yakni Tjokorde Ngoerah Pemajoen sebagai ketua wakil dari Perkoempoelan Goeroe-goeroe Denpasar, sekretaris Poetoe Wirja, dan Pembantu I Goesti Ajoe Rapeg masing-masing dari Bali Dharma Laksana dan Poetri Bali Sadar. Tjokorde Ngoerah Pemajoen sebagai ketua *Commissie* memberikan inisiatif untuk mendirikan kursus-kursus pemberantasan buta huruf di Badung dan Tabanan. Tempat yang digunakan untuk kursus adalah gedung sekolah negeri. Kursus ABC dalam waktu empat bulan sudah dapat membebaskan sekitar 500 orang dari buta huruf (Cokorde Gede Rai, 1982: 19-20).

Tjokorde Ngoerah Pemajoen bersedia memberikan kursus kepada siapa saja yang senang membantu dan bekerja untuk kemajuan kursus ABC (Ida Bagoes Indra, 1938: 241). Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kursus ABC mengalami sedikit rintangan dan kesulitan karena semakin tinggi tujuan maka semakin berat beban yang harus dipikul. Salah satu rintangannya adalah kesadaran masyarakat Bali tentang arti dan makna pendidikan. Masyarakat Bali pada saat itu sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Petani sangat perlu mempunyai pengetahuan luas tentang pertanian, sebab suatu usaha yang tidak berdasarkan pengetahuan akan sulit untuk maju. Akan tetapi, para petani sebagian besar mempunyai pengetahuan yang sempit dan penghasilan rendah sehingga menyebabkan dalam pandangan umum derajatnya rendah. Akibatnya pandangan para petani terhadap arti pendidikan kurang. Mereka lebih suka menyuruh anak-anaknya membantu pekerjaan daripada menyekolahkanya. *Commissie* berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa hanyalah tergantung dari kekuatan rakyat yang memiliki pengetahuan yang luas. Masyarakat yang sebagian besar tinggal di desa-desa dan pegunungan perlu disadarkan tentang arti pendidikan, karena mereka mempunyai anggapan bahwa dengan mendapat pendidikan kelak hanya akan menjadi *abtenaar* belaka. Pengertian yang seperti itu mengakibatkan mereka tidak suka menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, diharapkan generasi berikutnya akan lebih luas pengertiannya tentang pendidikan daripada orang tuanya (Gede Panetja dan I Wajan Bhadra, 1940: 91).

Di sisi lain, pada tahun 1939, Belanda melaksanakan proyek *Baliseering*. Tujuan dari proyek ini adalah: i) meningkatkan cara membangun sekolah dengan gaya yang cocok untuk Bali; ii) mengubah bentuk pendidikan menggambar; iii) mengubah bentuk pendidikan menyanyi; iv) mengumpulkan bahan-bahan bacaan untuk pembuatan buku-buku baru; v) memasukkan unsur-unsur dari tari-tarian Bali ke dalam pendidikan olah raga (Ida Bagus Sidemen, dkk, 1983: 11); dan vi) memanfaatkan waktu dengan membuat karya bebas seperti melukis, menganyam, menjahit, atau pekerjaan yang bermanfaat lainnya (H.J.E. Moll, 71-72).

Tujuan yang pertama dapat diwujudkan di Gianyar, pada tanggal 15 Juli 1939 dengan dibukanya sekolah bergaya baru, yang merupakan perpaduan selera Barat dan perasaan seni secara Bali. Tembok-temboknya dari batu merah dan paras, sedangkan ukirannya khas Bali. Sekolah-sekolah lain segera mengikutinya, sehingga dalam waktu relatif singkat, muncul 25 bangunan sekolah bergaya baru (Ida Bagus Sidemen, dkk, 1983: 12).

Sekolah-sekolah di Mengwi dan Peliatan misalnya, dibuat dari batu paras yang jarang dapat dilihat di pulau Bali yang sudah terkenal dengan ukiran-ukirannya yang sangat indah. Dari ke-25 sekolah tersebut tak ada dua sekolah pun yang sama bentuknya. Menjiplak tidak mungkin bagi seorang Bali yang dikaruniai keterampilan yang artistik. Di distrik Selat, atap sekolah dibuat dari genteng bambu, sekolah-sekolah lainnya memakai atap dari genteng merah, lain lagi memakai atap dari alang-alang (Ida Bagus Sidemen, dkk, 1983: 12).

Baliseering adalah salah satu upaya untuk mencegah orang-orang muda diekspose terkena pengaruh-pengaruh yang tak diharapkan, terutama radikalisme nasionalisme di Jawa. Selain *Baliseering*, mereka mau memberlakukan pendidikan dasar 3 tahun di sekolah-sekolah desa. Kurikulum disesuaikan dengan suasana pribumi. Dengan mengutip Te Flierhaar (1941), Henk Schulte Nordholt mengatakan yang amat dibangga-banggakan dalam pendidikan jenis ini ialah sekolah elite swasta, yaitu Sekolah Siladarma di Klungkung yang dibuka pada tahun 1938 dengan guru-guru Belanda (Henk Schulte Nordholt, 2002: 176).

Baik akses terbatas terhadap pendidikan menengah maupun Balinisasi kurikulum, tidak berhasil menghalangi orang-orang muda Bali berhubungan dengan gagasan-gagasan baru. Hal itu terutama terjadi di sekolah-sekolah swasta yang dibuka di Bali yang banyak datang dari anggota gerakan nasionalis Jawa. Sekolah-sekolah itu begitu banyak

menarik pelajar yang tidak dibolehkan memasuki sekolah-sekolah pemerintah dan menyebarkan benih nasionalis di seluruh pulau Bali (Henk Schulte Nordholt, 2002: 176).

Belanda juga mendirikan sekolah modern untuk kaum wanita. Di Singaraja didirikan *huishoudschool* dan berhasil memperoleh murid sebanyak 40 orang. Di Denpasar, pada tahun 1938 didirikan pula sekolah serupa diberi nama *landschapshuidhoudschool Goena Wanita* (H.J.E. Moll, 75). Pada mulanya animo para wanita memasuki pendidikan ini sangat besar. Akan tetapi pada akhirnya menyusut karena orang Bali menganggap pendidikan bagi para wanita sebagai barang mewah, karena tidak ada sesuatu yang dapat dihasilkan darinya. Belanda terpaksa menggunakan pengaruhnya untuk membuat agar sekolah tetap terisi. Kondisi ini sangat mengecewakan mereka, tetapi kaum wanita dari kalangan kaya dan elite (terutama yang telah maju, yang menyelesaikan pendidikannya di Jawa) menuntut agar ide-ide pencerahan tetap diberikan (H.J.E. Moll, 75).

Diselenggarakan pula sejumlah kursus keterampilan, misalnya sebuah kursus pertukangan kayu di Denpasar pada tahun 1941. Tujuannya mendidik tukang bagi kerajinan kayu untuk membuat perabotan rumah tangga, peralatan pertanian, dan pembangunan rumah dan bangunan berguna lainnya. Pesertanya adalah para lulusan sekolah lanjutan dan para tukang, yang tidak diwajibkan mengikuti teori pendidikan itu. Setiap daerah diberikan jatah dua orang, sehingga peserta keseluruhannya menjadi enam belas orang. Mereka diberikan pendidikan selama dua sampai tiga tahun secara gratis, namun hasil karyanya dijual untuk dijadikan dana sekolah (H.J.E. Moll, 38&75). Selain pertukangan, ada juga kursus pertanian. Materi yang diberikan dalam kursus ini terutama masalah pertanian lokal. Dengan tujuan agar bisa meluaskan pendidikan warga desa di bidang pertanian, maka selama tahun 1940 diselenggarakan sebuah kursus di bidang pertanian bagi sejumlah guru sekolah rakyat. Pada bulan Desember 1940, lima orang guru sudah berhasil mengikuti (H.J.E. Moll, 38 & 75).

Belanda juga mengizinkan berdirinya sekolah partikelir tanpa subsidi. Sekolah partikelir yang mendapat pengakuan (terpenting) oleh Belanda adalah Setia Hati di Negara (Jembrana) yang diberi wewenang menggunakan istilah HIS. Sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda adalah BHS Sisiapura di Singaraja dan Seririt, keduanya di daerah Buleleng; *Hollandsche Balische School* di Bajra (Tabanan) dan sekolah Taman Siswa di Denpasar. Di luar sekolah itu, semuanya tidak dianggap

penting oleh Belanda, dikategorikan sebagai sekolah liar (H.J.E. Moll, 38 & 75).

4. Kesimpulan

Modernitas bidang pendidikan di Bali pada masa kolonial Belanda ditandai dengan berdirinya sekolah. Namun pada awalnya mengalami tantangan sulitnya penerimaan pendidikan pada masyarakat. Lambat laun respon masyarakat mulai membaik. Didirikan berbagai sekolah dan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat Bali. Pada tahun 1920-an, banyak pelajar Bali yang melanjutkan pendidikan ke Jawa karena kurangnya sekolah di Bali. Perkumpulan-perkumpulan seperti Setiti Bali, Suita Gama Tirta, dan Shanti dibentuk untuk memajukan pendidikan, agama, dan adat istiadat masyarakat Bali. Upaya Belanda dalam pendidikan di Bali termasuk mendirikan sekolah modern dengan pendekatan budaya lokal melalui proyek Baliseering. Belanda juga mendirikan sekolah untuk wanita, namun penerimaan masyarakat terhadap pendidikan wanita masih terbatas. Pendidikan di Bali juga diwarnai oleh perkembangan sekolah swasta/partikelir yang menyebarkan gagasan nasionalis.

5. Daftar Pustaka

- B'Yana. "Seorang Pelajar mengeluh; Masalah Guru & Perguruan Kepada Rekanku: S." *Bhakti*, (Th I 5 Oktober 1952).
- Gede Panetja dan I Wajan Bhadra, "Pemberantasan Buta Huruf." *Djatajoe* (No. 7 tahun ke-4, 25 Februari 1940).
- Ida Bagoes Indra, "Onderwijs." *Djatajoe* (No. 7 tahun 2, 25 Februari 1938).
- Moll, H.J.E. "Memorie van Overgave van den aftrendend Resident van Bali en Lombok." Dese memorie bedeeft tw zijn een aanvulling op de voorgaande gewestelijke memories.
- Nordholt, Henk Schulte. *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Terj. Putra Adnyana. Denpasar: Pustaka Larasan, 2006.
- Pindha, I Gusti Ngurah. *Perang Bali Sebuah Kisah Nyata*. Jakarta: Dolphin, 2013.
- Putra Agung, Anak Agung Gde. *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001.
- Rai, Cokorde Gede "Peranan Perkoempulan Goeroe-Goeroe Denpasar di Bali Tahun 1934 sampai Tahun 1941." *Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana*, 1982. (Skripsi Sarjana Muda).
- Rai, I Gusti Ngurah. "Pengaruh Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang di Singaraja Tahun 1942 Sampai Tahun 1945." *Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana*, 1982. (Skripsi)
- Raka, I Gusti Gde. *Monografi Pulau Bali*. Jakarta: Pusat Jawatan Pertanian Rakyat Jakarta, 1955.
- Sana. "Masalah Pendidikan." *Damai* (No.16-17, Tahun ke II, 17 Nopember 1954).
- Sidemen, Ida Bagus (et. al.). "Balisering dan perkembangan pariwisata budaya di Bali," dilaksanakan melalui biaya proyek peningkatan/pengembangan perguruan tinggi Universitas Udayana 1983. "Tinjauan Masalah Pendidikan:

Menguntungkankah sistim-pengajaran-kejar ijasah.” *Bhakti* (Tahun II, 1 September 1953).